

# Analisis pengaruh Corporate Governance terhadap aktivitas Tax Avoidance dengan Siklus Hidup Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Nathania Allisya Krisira, Valerie Angela Halim, Yulius Jogi

*Accounting Department, Petra Christian University, Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, Indonesia*

\*Coressponding author; Email: d12170099@john.petra.ac.id

## ABSTRACT

Company always makes efforts to maximize its profits, including tax avoidance that's usually done by the management to increase profits for the company. To minimize the occurrence of tax avoidance, companies have to implement good corporate governance in their company. In every life cycle that company goes through, it also influences the tax avoidance actions that can be taken to maintain the company. This study aims to examine the relationship of corporate governance to tax avoidance that is moderated by the firm's life cycle. The total sample studied with a purposive sampling is 24 companies in the consumption industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. Data is analysed with a multiple linear regression that is then processed by using GRET. Based on the results of the analysis, the components of corporate governance have no effect on tax avoidance, but the existence of a life cycle phase can affect independent commissioners and institutional ownership with tax avoidance.

**Keywords:** Tax Avoidance, Corporate Governance, Firm Life cycle, Institutional Ownership, Independent Committee, Audit Committee

## ABSTRAK

Perusahaan selalu melakukan upaya untuk memaksimalkan labanya, tidak terkecuali dengan melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan laba bagi perusahaan. Untuk meminimalkan terjadinya tax avoidance, perusahaan perlu menerapkan corporate governance yang baik. Dalam setiap siklus hidup yang dilewati oleh perusahaan turut berpengaruh dalam tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan untuk mempertahankan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan corporate governance terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh siklus hidup perusahaan. Total sampel yang diteliti dengan purposive sampling adalah 24 perusahaan pada sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Pengumpulan data kemudian diolah menggunakan GRET. Berdasarkan hasil analisis, komponen pada corporate governance tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, namun dengan adanya fase siklus hidup dapat mempengaruhi komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

**Kata kunci:** penghindaran pajak, Corporate Governance, siklus hidup perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit

## PENDAHULUAN

Setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh laba semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba dapat dilakukan dengan membayar pajak secara efisien. Pembayaran pajak

yang diberikan kepada negara berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun, setiap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara juga berpotensi untuk mengurangi laba yang diperoleh dari sebuah perusahaan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari berkurangnya laba, yaitu dengan melakukan

perencanaan pajak atau menghindari beban pajak yang sering kali disebut dengan tax avoidance dan tax evasion. Nugroho dan Agustia (2017) menyatakan bahwa usaha memaksimalkan laba dapat dilakukan dengan meminimalkan beban pajak dimana pemegang saham menginginkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan porsi dalam ketentuan hukum yang berlaku. Tekanan yang dimiliki oleh manajemen untuk mengatur pajak dengan benar mengakibatkan setiap perusahaan perlu membentuk Corporate Governance yang baik sebagai bentuk pengawasan.

Corporate Governance sebagai suatu sistem mekanisme pengawasan dalam mengatur perusahaan secara internal maupun eksternal, dibentuk dalam rangka untuk mendorong terwujudnya prinsip yang dimiliki oleh Corporate Governance yakni transparansi, accountability, responsibility, independency dan fairness (Tandean, 2015). Dalam penelitian ini, komponen sebagai pengukur Corporate Governance akan difokuskan kepada faktor proporsi komisaris independen, persentase kepemilikan institusional dan jumlah komite audit. Hal ini dikarenakan ketiga komponen tersebut memiliki peranan yang penting sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan agar prinsip Corporate Governance dapat terpenuhi. Proporsi dewan komisaris perusahaan dibagi menjadi dua jenis yaitu dewan komisaris independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dan non-independen yang merupakan pihak terafiliasi.

Sebagai bagian dari Corporate Governance, Komisaris Independen diharapkan dapat berperan sebagai penghubung dalam mengawasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Penelitian mengenai pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance secara umum telah dilakukan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015; Yuni & Setiawan, 2019; Mulyani et al, 2018; Diantari & Ulupui 2016 ; Waluyo 2017) , jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015; eksandy, 2017; Diantari, & Ulupui, 2016) dan persentase kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Yuni & Setiawan 2019, Waluyo 2017). Dengan adanya hasil yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan semakin tidak agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

Selain adanya pengaruh dari corporate governance, tahap siklus hidup perusahaan juga

menjadi salah satu penentu utama terjadinya penghindaran pajak (Hasan et al, 2016). Adanya perbedaan sumber daya, insentif, peluang manajerial dan fundamental ekonomi di dalam perusahaan pada tahap siklus hidup tertentu menyebabkan adanya tingkat penghindaran pajak perusahaan yang berbeda. Hal ini membuat peneliti termotivasi untuk menggunakan siklus hidup perusahaan sebagai variabel moderasi. Dengan adanya variabel moderasi siklus hidup perusahaan, diharapkan dapat mengetahui apakah mampu memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel corporate governance dengan variabel tax avoidance.

Dalam perumpamaan Moshtagh et al (2014), siklus perusahaan seperti layaknya manusia yang juga melalui banyak jenjang tahapan dalam hidup dari lahir hingga kematian. Berdasarkan dari hasil penelitian Rezayar dan Assadi (2016), siklus hidup perusahaan dibagi menjadi empat tahapan yakni melalui fase introduction, growth, mature dan decline. Selama melewati fase siklus hidup perusahaan akan berpengaruh terhadap keadaan struktur, sumber daya, aliran kas hingga pengendalian internal yang berbeda (Rizal & Sebrina, 2019). Dimana dalam setiap tahapan yang dilalui oleh setiap perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda dari pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selama melewati keempat tahapan tersebut terdapat adanya pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak selama melewati fase introduction dan decline, sedangkan perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak selama melewati fase growth dan mature (Hasan et al, 2016; Mangoting & Onggara, 2019).

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk memperoleh bukti empiris apakah siklus hidup perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Corporate Governance dengan Tax Avoidance. Sehingga, penulis memutuskan untuk mengangkat penelitian yang berjudul "Pengaruh Corporate Governance terhadap Aktivitas Tax Avoidance dengan Siklus Hidup Perusahaan sebagai Variabel Moderasi". Sebagai sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan seluruh perusahaan di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 - 2019. Hal ini dikarenakan perusahaan di sektor industri konsumsi kerap berkembang dan memiliki pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, terutama dalam sektor

industri makanan dan minuman yang telah bertumbuh sebanyak 7,99% pada tahun 2019 disebabkan karena adanya pertumbuhan dari dukungan sumber daya alam melimpah dan diiringi oleh permintaan domestik yang tinggi (kemenperin, 2019).

### ***Teori Agensi (Agency Theory)***

Teori agensi menjelaskan hubungan yang dimiliki antara agent dengan principal. Dimana agent merupakan manajemen yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawab oleh perusahaan dengan principal yang dimaksud sebagai pemegang saham atau pemilik. Pada umumnya kepemilikan suatu perusahaan dipegang oleh beberapa pemegang saham, namun tidak seluruh pemegang saham mampu berperan secara langsung dalam mengendalikan jalannya perusahaan. Maka dari itu, pemegang saham (principal) merekrut manajemen (agent) untuk mengelola jalannya perusahaan. Dalam posisi ini, seringkali manajer bertindak tidak menyesuaikan dengan keinginan pemegang saham terutama dalam memaksimalkan kebutuhan bagi para pemegang saham (Asiyah, 2018). Pemegang saham terus memaksa manajer agar perusahaan mengalami peningkatan nilai maupun kinerja dengan mendapatkan laba perusahaan yang tinggi namun beban yang dimiliki oleh perusahaan harus tetap kecil (Putra et al, 2018). Manajer perusahaan akhirnya melakukan tindakan penghindaran pajak dengan meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan supaya laba sebelum pajak di laporan keuangan perusahaan berkurang. Di sisi lain, pemegang saham mengharapkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan agar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham semakin maksimal (Nugroho & Agustia 2017).

### ***Resource Based Theory***

Teori ini menjelaskan bahwa semakin baik perusahaan mengelola sumber dayanya, maka perusahaan tersebut dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam dunia persaingan bisnis. Resource based theory berfokus terhadap bagaimana perusahaan mengupayakan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya pada strategi bisnis yang diterapkan dalam setiap tahap siklus hidup perusahaan (Suranta et al, 2019). Sumber daya yang dimaksud yaitu arus kas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan. Secara relatif perusahaan

akan menjalani tahapan siklus hidup yang serupa, namun setiap perusahaan akan berada dalam posisi tahapan yang berbeda. Sehingga, strategi bisnis yang akan dilakukan perusahaan dalam setiap tahap siklus hidup tidak akan sama. Strategi bisnis ini biasanya akan berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mengalokasi sumber dayanya hingga kegiatan investasi maupun inovasi produk. Maka dari itu, kemungkinan manajemen dalam menjalankan penghindaran pajak juga dapat terprediksi dengan mengamati setiap karakteristik tahap siklus hidup perusahaan selama membangun nilai kompetitifnya.

### ***Tax Avoidance***

Pohan (2013) menjelaskan bahwa tax avoidance merupakan upaya menghindari pajak yang bersifat legal bagi wajib pajak dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode dan teknik cara yang digunakan dalam tax avoidance cenderung memanfaatkan kelemahan yang ada di undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Melakukan tax avoidance juga memiliki resiko yang memungkinkan terjadi di perusahaan salah satunya mendapatkan denda, mempengaruhi reputasi perusahaan dan publisitas.

Pada penelitian ini, tax avoidance dihitung menggunakan metode effective tax rate atau yang biasa disebut ETR. Nilai ETR yang lebih rendah menandakan jika perusahaan melakukan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika nilai ETR yang semakin tinggi menandakan jika perusahaan melakukan penghindaran pajak yang rendah (Andrean, 2018). Perhitungan ETR dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR_{it} = \frac{\text{Beban pajak it}}{\text{Laba sebelum pajak it}} \times 100\%$$

### ***Proporsi Kepemilikan Institusional***

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, bank, dan kepemilikan institusi lainnya (Dewi & Jati, 2014). Institusi atau lembaga yang dimaksud dalam kepemilikan institusional merupakan pihak luar yang menanamkan saham pada perusahaan terkait. Institusi atau lembaga yang berinvestasi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi untuk mengelola investasinya dalam perusahaan tersebut

(Cahyono et al., 2016). Semakin besar investasi di dalam perusahaan maka sistem pengawasan dalam perusahaan harus semakin tinggi. Adanya kepemilikan institusional mampu mengawasi kinerja manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, maka dari itu semakin besarnya proporsi kepemilikan institusional di dalam perusahaan dapat mendorong meningkatnya pengawasan kinerja manajemen supaya efisien dan maksimal. Proporsi kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi sikap manajer bertindak egois yang mementingkan diri sendiri karena adanya pengawasan yang intensif (Oktofian, 2015). Proporsi kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{KepInit} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki insitiusi it}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan it}} \times 100\%$$

### Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang statusnya berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang menilai kinerja perusahaan (Oktadella & Zulaikha, 2010). Komisaris independen harus menjadi pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, anggota komisaris dan direksi lain di perusahaan terkait (Diantari & Ulupui, 2016). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 57 tahun 2017, jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan minimal 30% dari total seluruh anggota dewan komisaris, jika perusahaan telah sesuai dalam aturan ini maka perusahaan telah menaati peraturan corporate governance menurut aturan (BEI) Nomor Kep- 305/BEJ/07-2004 (Eksandy, 2017). Proporsi komisaris independen yang semakin besar dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan akan semakin kecil (Raharjo & Daljono, 2014). Perhitungan komisaris independen dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KomInit} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independenit}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan it}} \times 100\%$$

### Komite Audit

Komite Audit merupakan sebuah organ penting dalam perusahaan yang dibutuhkan untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tanggung jawab dan fungsi komite audit yang perlu dipenuhi yaitu untuk memastikan bahwa manajemen telah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya, perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan sebagai bentuk pengawasan bagi perusahaan untuk menghindari adanya hal yang mampu memberikan risiko serta sebagai sistem pengendalian internal.

Semakin sedikit keanggotaan komite audit dapat berdampak pada sedikitnya keragaman maupun pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan yang dimiliki oleh anggota sehingga kurang mampu menganalisa laporan keuangan dengan baik maupun menjalankan prinsip - prinsip pengawasan internal (Sandy & Lukviarman, 2015). Maka dari itu, sesuai dengan yang diatur oleh BAPEPAM - LK (2012) bahwa setiap anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dengan beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari komisaris independen sebagai ketua bersama dengan pihak profesional dari luar emiten atau perusahaan publik. Dengan mengikuti jumlah anggota Komite Audit sesuai yang diatur dalam BAPEPAM - LK diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan masukan terhadap kendala mengenai kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Maka dari itu, untuk mengukur seberapa baik kinerja komite audit akan diukur dengan seberapa banyak jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{KAit} = \sum \text{Anggota komite audit}_i$$

### Siklus Hidup Perusahaan

Siklus hidup perusahaan merupakan jenjang proses yang dilalui perusahaan untuk berkembang dan merupakan suatu proses linear yang berurutan. Semua perusahaan pasti melalui tahap pendirian, bertumbuh matang hingga akhirnya tutup. Penelitian Dickinson (2011) membagi siklus hidup perusahaan menjadi 5 fase yaitu *introduction, growth, mature, shake out, dan decline*. Pada fase *introduction* perusahaan masih dalam tahap *start-up* sehingga perusahaan memerlukan sumber daya untuk melakukan investasi terhadap pembiayaan awal maupun modal. Pada tahap *growth* perusahaan mulai bertumbuh dan sudah berhasil melalui rintangan di masa awal serta berhasil memperjuangkan produk

barang atau jasa yang dijual di pasar, perusahaan juga mulai mendapatkan kedudukan yang bermakna di mata pesaing potensial (Abbas, *et al* 2018). Pada tahap ini perusahaan melakukan investasi yang besar untuk mendapatkan laba dan arus kas cenderung positif. Pada fase mature, perusahaan berusaha untuk lebih efisien dengan mengurangi kegiatan investasi dan hal-hal yang tidak pasti. Perusahaan cenderung memiliki karakteristik untuk meningkatkan struktur tata kelola perusahaan dan juga distribusi modal yang diberikan kepada pemegang saham lebih besar (Hasan et al., 2016). Pada fase decline, perusahaan mengalami penurunan sehingga perusahaan lebih fokus kepada likuidasi aset yang memungkinkan terjadinya arus kas operasi yang negatif. Arus kas perusahaan pada fase ini tidak stabil, tingkat likuiditas perusahaan rendah. Pada tahap shake out Perusahaan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Untuk mengembalikan posisi Perusahaan pada posisi semula, Perusahaan perlu menekan kembali inovasi terbaru (Mangoting & Onggara, 2018). Tahap shakeout tidak akan digunakan dalam penelitian ini.

Introduction <sup>it</sup>	$CFO < 0, CFI < 0, CFF > 0$
Growth <sup>it</sup>	$CFO > 0, CFI < 0, CFF > 0$
Mature <sup>it</sup>	$CFO > 0, CFI < 0, CFF < 0$
Decline <sup>it</sup>	$CFO < 0, CFI > 0, CFF \leq 0 \text{ or } \geq 0$

### **Hubungan kepemilikan institusional dengan tax avoidance**

Menurut Fadilah (2014) semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dapat mengurangi terjadinya permasalahan perbedaan kepentingan antara *agen* dan *principal* yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk memantau secara efektif dalam mengontrol tata kelola sehingga dapat berpengaruh terhadap tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka tingkat pengawasan terhadap sistem tata kelola akan semakin baik sehingga dapat mengurangi konflik keagenan yang dapat menyebabkan tindakan penghindaran pajak semakin berkurang.

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **Hubungan antara Komisaris Independen dengan Tax Avoidance**

Seperti yang dijelaskan dalam *agency theory*, ada perbedaan keinginan antara *principal* sebagai pemegang saham yang mendorong *agent* sebagai manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mendorong bertambahnya laba namun ingin memaksimalkan efisiensi biaya perusahaan melalui pembayaran pajak yang timbul. Pada kasus seperti ini komisaris independen dapat mengupayakan untuk meminimalkan terjadinya penghindaran pajak karena pihak komisaris independen tidak terafiliasi dengan kepentingan pemilik saham (Prakosa, 2014). Semakin besarnya jumlah komisaris independen, maka pengawasan terhadap manajemen didalam perusahaan akan semakin ketat untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak.

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **Hubungan antara Komite Audit dengan Tax Avoidance**

Anggota komite audit memiliki keahlian dalam bidang akuntansi maupun keuangan sehingga lebih memahami peraturan yang diatur dalam perpajakan dan mampu menghindari risiko deteksi. Dengan keahlian yang mumpuni di bidangnya, komite audit mampu memberi masukan maupun saran yang bermanfaat untuk penghindaran pajak (Puspita, 2014). Di dalam BEI telah diatur bahwa jumlah keanggotaan komite audit sedikitnya adalah tiga orang. Sehingga semakin sedikitnya jumlah anggota komite audit dapat menyebabkan rentannya tindakan manajemen dalam meminimalisasi laba demi kepentingan penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015).

H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

### **Hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan dengan Tax Avoidance**

Dari setiap tahapan siklus hidup yang dilewati perusahaan terdapat karakteristik yang berbeda-beda. Pada saat perusahaan melewati tahap introduction pada umumnya perusahaan masih belum mampu memahami dengan baik bagaimana menentukan arus kas yang baik untuk di masa depan sehingga manajer memiliki kesempatan untuk

mengatur penghindaran pajak yang dapat dilakukan bagi perusahaan (Suranta et al, 2020). Selain itu kondisi yang serupa juga terjadi pada saat perusahaan melewati tahap decline, pada saat perusahaan melewati tahap ini perusahaan cenderung untuk menghindari pajak karena arus kas perusahaan yang tidak stabil dan terjadinya likuiditas perusahaan atau manajemen cenderung untuk lebih memilih mengambil resiko tinggi yang dapat melibatkan kegiatan finansial yang agresif dan strategi perpajakan yang hingga berujung dengan kemungkinan terjadinya untuk melakukan penghindaran pajak (Irawan & Afif, 2020).

Dalam siklus hidup perusahaan, perusahaan juga akan melewati tahap growth dan mature dimana dalam tahapan ini perusahaan tengah berada di fase yang stabil dalam kegiatan bisnisnya. Selama berada di fase growth, perusahaan telah bangkit dari tahapan introduction. Pada tahapan ini perusahaan telah mulai dikenal oleh pasar dan berani untuk memperluas bisnisnya dengan mulai melakukan pengenalan dengan mengeluarkan produk baru. Lalu perusahaan akan melewati tahap mature, dimana pada tahap ini perusahaan telah memiliki akses yang lebih besar untuk memperoleh sumber dayanya. Pada tahapan ini perusahaan juga tidak lagi menghadapi volatilitas arus kas dan memiliki net income yang lebih konsisten (Irawan & Afif, 2020). Sehingga pada tahap ini perusahaan tidak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hipotesis ini juga sejalan dengan hasil dari penelitian Hasan et al., (2016) serta Mangoting & Onggara, (2019) dimana perusahaan pada saat melewati tahap mature dan growth berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H4 : Siklus Hidup Perusahaan pada tahap introduction dan decline (mature dan growth) berpengaruh positif (negatif) terhadap Tax Avoidance

#### **Hubungan Siklus Hidup Perusahaan dalam memoderasi hubungan dari kepemilikan institusional dengan Tax Avoidance**

Karena adanya tata kelola pada kepemilikan institusional yang baik, maka besarnya kepemilikan institusional dapat berpengaruh untuk mengurangi keagresifan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Namun, tata kelola perusahaan yang baik juga tidak menjamin perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena adanya perubahan kondisi tahapan yang dilalui perusahaan

yaitu siklus hidup perusahaan yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Pada fase introduction dan decline perusahaan cenderung pada kondisi sulit sehingga cenderung lebih menghindari pajak. Sedangkan pada fase mature dan growth perusahaan sudah cenderung stabil sehingga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Saat perusahaan berada di fase *introduction* dan *decline* maka hubungan antara kepemilikan institusional dengan tax avoidance akan semakin lemah. Sebaliknya, apabila perusahaan berada di fase growth dan mature maka hubungan kepemilikan institusional dengan tax avoidance akan semakin kuat.

H5 : Perusahaan pada fase *introduction dan decline (growth dan mature)* akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara kepemilikan institusional dengan tax avoidance

#### **Hubungan Siklus Hidup Perusahaan dalam memoderasi hubungan dari komisaris independen dengan Tax Avoidance**

Karena sikapnya yang independen, komisaris independen dapat meminimalkan terjadinya penghindaran pajak di dalam perusahaan. Sehingga semakin besar jumlah proporsi komisaris independen maka penghindaran pajak akan semakin berkurang. Namun selain adanya komisaris independen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak, ada faktor lain yaitu siklus perusahaan yang dapat berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan karena di setiap fase yang dilalui siklus perusahaan memiliki perbedaan perilaku pada perusahaan dalam pembayaran pajaknya.

H6 : Perusahaan pada fase *introduction dan decline (growth dan mature)* akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara komisaris independen dengan tax avoidance

#### **Hubungan Siklus Hidup Perusahaan dalam memoderasi hubungan dari komite audit dengan Tax Avoidance**

Adanya komite audit memungkinkan pengendalian perusahaan dan laporan keuangan berjalan secara efektif, termasuk dengan peranannya untuk membawa perusahaan berada di koridor yang tepat untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

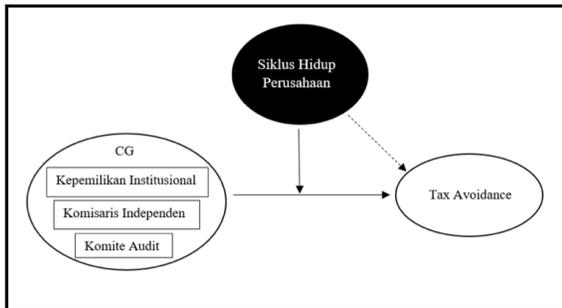
Namun setiap perusahaan tidak akan selalu melewati tahapan yang sama, hal ini disebut sebagai siklus hidup perusahaan. Dalam setiap tahap siklus hidup yang dilewati oleh sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penghindaran pajak. Masih sama dengan hasil sebelumnya, pada tahap *introduction* dan *decline* perusahaan cenderung lebih menghindari pajak, berbeda dengan tahap *mature* dan *growth* dimana perusahaan sudah stabil dan cenderung tidak menghindari pajak. Oleh karena itu, perusahaan pada fase *introduction* dan *decline* memperlemah hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila perusahaan berada di fase *growth* dan *mature* memperkuat hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance*.

H7 : Perusahaan pada fase *introduction* dan *decline* (*growth* dan *mature*) akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance*.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai model analisis dan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Model Analisis



Hipotesis akan diuji dengan metode regresi linear berganda dengan rumus:

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 KepIn_{it} + \beta_2 KomIn_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 SH_{it} + \beta_5 SH_{it} * KepIn_{it} + \beta_6 SH_{it} * KomIn_{it} + \beta_7 SH_{it} * KA_{it} + \epsilon_{it}$$

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Sumber data penelitian adalah sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI 2015-2019. Pada penelitian ini, populasi yang diambil melalui perusahaan sektor

industri konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang diterapkan oleh peneliti.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian data panel menggabungkan data *cross section* dengan data *time series*. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini seluruhnya akan dikelompokkan kemudian dilakukan perhitungan supaya dapat membantu terhadap pengumpulan data yang telah terkumpul dari *GRETL*. Untuk melakukan analisis data, tahapan yang perlu dilakukan yaitu melakukan penghitungan statistik deskriptif, menentukan model estimasi, melakukan uji kelayakan regresi linear berganda, melakukan uji asumsi klasik dan melakukan uji kelayakan hipotesis.

### HASIL PENELITIAN

Gambaran umum pada penelitian ini dilakukan berdasarkan sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019. Setelah dilakukan purposive sampling, dari total 51 perusahaan hanya terdapat 24 perusahaan yang memenuhi kriteria. Sehingga, total sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 120 sampel.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variable	N	Mean	Median	S.D.	Min	Max
ETR	120	0,278	0,254	0,108	0,036	0,815
KepIn	120	0,725	0,789	0,216	0,051	0,995
KomIn	120	0,424	0,400	0,113	0,333	0,800
KA	120	3,020	3,000	0,129	3,000	4,000
KepIn*SH	120	0,063	0,000	0,213	0,000	0,918
KomIn*SH	120	0,033	0,000	0,116	0,000	0,667
KA*SH	120	0,258	0,000	0,865	0,000	4,000
SH dan ETR	N	Mean	Median	S.D.	Min	Max
Dummy 1	10	0,268	0,228	0,222	0,037	0,814
Dummy 0	110	0,278	0,763	0,092	0,092	0,763

Sumber: Hasil Uji Software GRETL

Hasil analisis deskriptif (tabel 2) variabel *Tax Avoidance* (ETR) diperoleh Mean 27%, angka ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki nilai ETR yang cukup tinggi (diatas 25%) dan menandakan bahwa perusahaan pada sektor konsumsi yang terdaftar di BEI memiliki tingkat agresivitas penghindaran pajak yang rendah. Nilai tertinggi (max) sebesar 0,81 yang menandakan bahwa ada perusahaan yang belum mampu

melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak dan nilai terendah (min) sebesar 0,036 yang menandakan bahwa ada perusahaan yang sangat agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Pada variabel Kepemilikan Institusional (KepIn) diperoleh nilai mean sebesar 0,72 angka ini menunjukkan bahwa rata-rata saham yang dimiliki oleh institusi didalam suatu perusahaan sebesar 72%. Nilai tertinggi (max) sebesar 0,99 atau 99% yang menandakan bahwa terdapat perusahaan yang hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh institusi dan nilai terendah (min) sebesar 0,011 atau 11% tertinggi (max) sebesar 0,99 dan nilai terendah (min) sebesar 0,051. Pada variabel Komisaris Independen (KomIn) diperoleh nilai mean sebesar 0,42 atau 42%, angka ini menandakan bahwa rata-rata perusahaan pada sektor konsumsi yang terdaftar di BEI sudah sesuai dengan aturan POJK no 57 yang mengharuskan perusahaan memiliki anggota komisaris independen minimal sebesar 30%. Nilai terendah (min) sebesar 0,33 atau 33%, angka ini menunjukkan rata-rata perusahaan sudah memenuhi aturan POJK no 54, sedangkan nilai tertinggi (max) sebesar 0,8 atau 80% yang menandakan bahwa ada perusahaan pada sektor konsumsi yang memiliki jumlah komisaris independen yang sangat tinggi dan tidak melanggar aturan POJK no 54. Pada variabel Komite Audit (KA) diperoleh nilai mean sebesar 3,02 yang menandakan bahwa rata-rata perusahaan sudah sesuai dengan BAPEPAM-LK 2012 yang mengatur bahwa jumlah anggota komite audit minimal adalah 3. Nilai tertinggi (max) sebesar 4,00 dan nilai terendah (min) sebesar 3,00, angka ini menandakan bahwa semua perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK 2012. Dan yang terakhir untuk asil analisis deskriptif variabel Kepemilikan Institusional\*Siklus Hidup Perusahaan (KepIn\*SH) diperoleh nilai tertinggi (max) sebesar 0,92 dan nilai terendah (min) sebesar 0,00. Dengan mean Kepemilikan Institusional\*Siklus Hidup Perusahaan (KepInSH) sebesar 0,063, median 0,00, dan standar deviasi 0,21.

### Model Estimasi Data Panel

Dalam melakukan analisis data panel, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan model estimasi yang paling sesuai, yaitu antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk mengetahui model estimasi yang sesuai harus dilakukan Uji chow, Uji

Lagrange Multiplier dan Uji Hausman. Uji chow membandingkan mana yang lebih sesuai antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Uji Lagrange Multiplier membandingkan mana yang lebih sesuai antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*.

Pada hasil uji software GRET, P-Value pada uji chow senilai 0,200422 (>0,05) maka *common effect model* yang diterima. P-value pada lagrange multiplier senilai 0,548 (>0,05) maka *common effect model* yang diterima. p-value pada Hausman test senilai 0,825 (>0,05) maka *random effect model* yang akan digunakan.

Hasil Uji pada chow test dan lagrange multiplier menunjukkan hasil bahwa *Common Effect Model* merupakan model yang cocok, maka model ini diterima dan akan digunakan pada penelitian. Apabila *Common Effect Model* yang digunakan, maka selanjutnya uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas perlu dilakukan.

### Uji Kelayakan Model Regresi Linear Berganda

Tabel 3 OLS

	Coefficient	Std. Error	t-ratio	p-value	
const	0,355	0,311	1,140	0,256	
KepIn	-0,075	0,047	-1,596	0,113	
KomIn	-0,023	0,092	-0,257	0,797	
KA	-0,004	0,103	-0,039	0,968	
SH	0,322	0,475	0,677	0,499	
KepIn*SH	0,800	0,281	2,841	0,005	***
KomIn*SH	-0,670	0,324	-2,067	0,041	**
KA*SH	-0,215	0,155	-1,386	0,168	

Mean dependent var	0,277	S.D. dependent var	0,107
Sum squared resid	1,184	S.E. of regression	0,102
R-squared	0,139	Adjusted R-squared	0,086
F(7, 112)	2,601	P-value(F)	0,015
Log-likelihood	106,807	Akaike criterion	-197,615
Schwarz criterion	-175,315	Hannan-Quinn	-188,559
rho	0,426	Durbin-Watson	1,009

Sumber: Hasil Uji Software GRET

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,086 yang ditunjukkan melalui Adjusted R-Square. Angka yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menggambarkan 8,6% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya yang

sebesar 90.96% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Hasil Uji-F sebesar 0,015 dan menunjukkan  $p\text{-value} < 0,05$ . Dengan demikian, seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi mampu mempengaruhi variabel dependennya layak untuk digunakan dalam penelitian.

### **Pengujian Asumsi Klasik**

Common effect model mengharuskan untuk melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pada uji normalitas, Hasil uji software GRETl pada uji normalitas di penelitian ini menunjukkan bahwa probability  $0,000 < 0,05$  dan menunjukkan distribusi tidak normal. Distribusi tidak normal pada uji normalitas dapat diabaikan dengan didasari teori central limit yang menyatakan bahwa tidak membutuhkan banyak informasi mengenai distribusi aktual variabel semasih adanya sampel yang cukup, sehingga dapat didistribusikan secara normal. Hal ini dikarenakan teori central limit bersifat lebih sederhana.

Menurut hasil uji heteroskedastisitas, hasil signifikansi 0,295 ( $P\text{-value} > 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya masalah heteroskedastisitas.

Menurut hasil uji multikolinearitas, VIF kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ) pada variabel Kepemilikan Institusional (KepIn), Komisaris Independen (KomIn), dan Komite Audit (KA) artinya menandakan tidak terjadi multikolinearitas. Namun, terdapat VIF lebih dari 10 ( $VIF > 10$ ) pada variabel Siklus Hidup (SH), interaksi hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional (KepIn\*SH), interaksi hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan dengan Komisaris Independen (KomIn\*SH), dan interaksi hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan dengan Kualitas Audit (KA\*SH) artinya menandakan terjadi multikolinearitas.

### **Uji Kelayakan Hipotesis**

Hasil dari uji hipotesis (tabel 3 OLS) menunjukkan ada tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen karena  $p\text{-value} > 0,05$ . Arah hubungan variabel independen dengan variabel dependennya dapat dilihat pada koefisien. Saat koefisien positif, maka terjadi hubungan positif antara variabel independen dan variabel dependennya. Namun, saat koefisien negatif, hal ini menunjukkan hubungan yang terjadi antara variabel

independen dan variabel dependennya adalah hubungan negatif.

### **Uji Hipotesis**

#### **H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $p\text{-value}$  dari kepemilikan institusional adalah 0,113 ( $p\text{-value} > 0,05$ ). Sehingga, Kepemilikan Institusional (KepIn) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Yuni & Setiawan (2019); Waluyo (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional di dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Adanya kepemilikan institusional tentu dapat mengawasi, mendisiplinkan dan berpengaruh pada manajemen untuk mementingkan keinginannya sendiri, namun kepemilikan institusional belum dapat memberikan kontrol secara langsung pada manajemen terhadap praktik penghindaran pajak. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional kurang efektif bagi perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Fadhillah (2014), Tandean (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016), dan Damayanti dan Susanti (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak.

#### **H2 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $p\text{-value}$  dari komisaris independen adalah 0,797 ( $p\text{-value} > 0,05$ ). Sehingga, Komisaris Independen (Kom\*In) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sandy & Lukviarman, 2015; Yuni & Setiawan, 2019; Mulyani et al, 2018; Diantari & Ulupui 2016 ; Waluyo 2017 yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance perusahaan. Adanya dewan komisaris berguna sebagai pemberi nasehat dan saran bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, namun komisaris independen tidak dapat turun dalam pengambilan keputusan perusahaan. Maka dari itu, jika nasehat dan saran yang diberikan oleh komisaris independen tidak dilaksanakan oleh manajemen, maka aktivitas penghindaran pajak dapat tetap terjadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alifianti (2017) yang menyatakan bahwa bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*.

### **H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai p-value dari komite audit adalah 0,968 (p-value>0.05). Sehingga Komite Audit (KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, H3 yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sandy & Lukviarman, 2015; eksandy, 2017; Diantari, & Ulupui, 2016 yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit belum mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen yang disebabkan karena kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Komite audit didalam perusahaan cenderung bersifat netral sehingga jumlah komite audit belum dapat dijadikan jaminan untuk aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanti (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **H4 : siklus hidup perusahaan pada tahap introduction dan decline (mature dan growth) berpengaruh positif (negatif) terhadap Tax Avoidance**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai p-value dari siklus hidup perusahaan adalah 0,499 (p-value>0.05). Sehingga Siklus Hidup (SH) tidak

berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa siklus hidup perusahaan pada tahap introduction dan decline (mature dan growth) berpengaruh positif (negatif) terhadap *Tax Avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasan et al. (2016) yang menyatakan bahwa siklus hidup berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Graham et al. (2014) menyatakan bahwa ada biaya reputasi yang harus dijaga oleh setiap perusahaan, oleh karena itu ditolaknya hipotesis ini dapat disebabkan karena perusahaan mempertimbangkan reputasi yang harus dihadapi jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, sehingga perusahaan menghindari resiko yang dapat disebabkan dari aktivitas penghindaran pajak. Menurut penelitian Rego (2012) manajer didalam perusahaan yang cenderung menghindari resiko akan lebih sedikit memikirkan cara untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan rata-rata manajer dan CEO yang ada di Asia cenderung untuk menghindari dari resiko. Jadi, siklus hidup perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak karena karakteristik manajemen yang memutuskan apakah akan melakukan penghindaran pajak atau tidak.

### **H5 : Perusahaan pada fase introduction dan decline (growth dan mature) akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara kepemilikan institusional dengan tax avoidance.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai p-value dari interaksi hubungan antara siklus hidup perusahaan dengan kepemilikan institusional adalah 0,005 (p-value<0.05). Sehingga Siklus Hidup Perusahaan berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan Kepemilikan Institusional (KepIn\*SH) terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, koefisien dari interaksi hubungan antara siklus hidup perusahaan dengan kepemilikan institusional adalah 0,8497. Sehingga, Siklus Hidup Perusahaan Memiliki pengaruh positif dalam memoderasi hubungan Kepemilikan Institusional (KepIn\*SH) terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, H4 yang menyatakan bahwa perusahaan pada fase introduction dan decline (growth dan mature) akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* ditolak karena signifikan namun tidak berhubungan negative ditolak.

### **H6 : Perusahaan pada fase introduction dan decline (growth dan mature) akan memperlemah**

**(memperkuat) hubungan antara komisaris independen dengan tax avoidance.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai p-value dari interaksi hubungan antara siklus hidup perusahaan dengan komisaris independen adalah 0,041 (p-value <0.05). Sehingga Siklus Hidup Perusahaan Berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan Komisaris Independen (KomIn\*SH) terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, koefisien dari interaksi hubungan antara siklus hidup perusahaan dengan komisaris independen adalah -0,67. Sehingga, Siklus Hidup Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi hubungan Komisaris Independen (KomIn\*SH) terhadap *Tax Avoidance*. Akan tetapi, variabel independen dan dependen pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan, oleh karena itu adanya moderasi siklus hidup perusahaan tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Oleh karena itu, H5 yang menyatakan bahwa Perusahaan pada fase introduction dan decline (growth dan mature) akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara komisaris independen dengan tax avoidance ditolak.

**H7 : Perusahaan pada fase introduction dan decline (growth dan mature) akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara komite audit dengan tax avoidance.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai p-value dari interaksi hubungan antara siklus hidup perusahaan dengan komite audit adalah 0,168 (p-value>0.05). Sehingga Siklus Hidup Perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan Komite Audit (KA\*SH) terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, H6 yang menyatakan bahwa perusahaan pada fase introduction dan decline (growth dan mature) akan memperlemah (memperkuat) hubungan antara komite audit dengan tax avoidance ditolak.

**Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum berhasil membuktikan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi tax avoidance.

2. Penelitian ini belum berhasil membuktikan bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi tax avoidance.
3. Penelitian ini belum berhasil membuktikan bahwa komite audit dapat mempengaruhi tax avoidance.
4. Penelitian ini belum berhasil membuktikan bahwa siklus hidup perusahaan dapat mempengaruhi tax avoidance.
5. Penelitian ini belum berhasil membuktikan bahwa dengan adanya siklus hidup perusahaan pada fase introduction dan decline dapat memperlemah dan fase mature dan growth dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dengan tax avoidance.
6. Penelitian ini belum berhasil membuktikan bahwa dengan adanya siklus hidup perusahaan pada fase introduction dan decline dapat memperlemah dan fase mature dan growth dapat memperkuat hubungan antara komisaris independen dengan tax avoidance.
7. Penelitian ini belum berhasil membuktikan bahwa dengan adanya siklus hidup perusahaan pada fase introduction dan decline dapat memperlemah dan fase mature dan growth dapat memperkuat hubungan antara komite audit dengan tax avoidance.

**Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dijalankan, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya :

1. Dalam penelitian ini variabel independen hanya berpengaruh sebesar 8,6% sehingga bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi tax avoidance.
2. Memperluas populasi maupun sampel dalam penelitian sehingga mampu mendapatkan gambaran seberapa besar pengaruh penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan Indonesia dari berbagai sektor dan menggunakan periode waktu yang lebih panjang sehingga tahapan siklus hidup perusahaan juga dapat lebih terlihat.
3. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis dapat menambahkan komponen lain dari corporate governance seperti kualitas audit atau kepemilikan manajerial tidak terbatas dalam kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit saja.

## Keterbatasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini masih memungkinkan terdapat keterbatasan maupun kekurangan. Untuk mendapatkan laporan keuangan masing-masing perusahaan, peneliti hanya dapat mengakses melalui website perusahaan dan jika data yang dibutuhkan tidak ada pada website tersebut, penelitian pada perusahaan terkait tidak dapat dilanjutkan. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada jumlah sampel perusahaan. Jumlah sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019 sebanyak 51 perusahaan, namun hanya 24 perusahaan yang dapat diteliti karena beberapa perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan tidak memiliki laporan data yang diperlukan untuk penelitian ini pada tahun 2015-2019 yang menyebabkan beberapa perusahaan tidak bisa digunakan dalam penelitian ini.

## REFERENSI

- Abbas, N., Seemab, K., Waheed, A., & Hussain, S. (2018) The Impact of Firm Life Cycle on Corporate Tax Avoidance Strategies. *Foundation University Journal of Business & Economics*, 3(2), 23-38.
- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1-11.
- Andrean, D. (2019). *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Financial Leverage terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri. Jakarta.
- Ardianingsih, A. (2013). Hubungan Komite Audit Dan Kompleksitas Usaha Dengan Audit Fee. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 20-28.
- Asiyah, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Petra Business & Management Review*, 4(2), 106-133.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Christina, S. & Alexander, N. (2018). Corporate Governance, Tax Planning and Firm Value. *In Proceedings of the 7th International Conference on Entrepreneurship and Business Management*, 233-237.
- Damayanti, F., & Susanti, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, resiko perusahaan, dan return on assets terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187-206.
- Dewi, N.N.K & Jati, I.K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249-260.
- Diantari, P.R. & Ulupui, I.A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. *The Accounting Review*, 86(6), 1969-1994.
- Edwards, A., Casey, S., & Terry, S. (2016). Financial Constraints and Cash Tax Savings. *The Accounting Review*, 91(3), 859-881. <http://dx.doi.org/10.2308/accr-51282>
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 1(1), 1-20. <http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadillah, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 12(1), 37-52.
- Filatochev, Igor, Steve, T., & Mike. W. (2006). The firm's strategic dynamics and firm governance Life-Cycle. *International Journal of Managerial Finance*, 2(4), 256-279. <http://dx.doi.org/10.1108/17439130610705481>
- Graham, John R., Hanlon M., Shevlin T., & Shroff N. (2014). Incentives for tax planning and avoidance: Evidence from The Field. *The Accounting Review*, 89(3), 991-1023.

- Halim, A., Bawono I. R. & Dara A. (2014). *Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta*. pp 8- 10
- Hasan, M. M., Al-Hadi, A., Taylor, G., & Richardson, G. (2016). Does a Firm's Life Cycle Explain Its Propensity to Engage in Corporate Tax Avoidance?. *European Accounting Review*, 26(3), 469–501. <http://dx.doi.org/10.1080/09638180.2016.1194220>
- Herdjiono, I., & Mega Sari, I. (2017). The Effect of Corporate Governance on the Performance of a Company. Some Empirical Findings from Indonesia. *Journal of Management and Business Administration*, 25(1), 33–52. <http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.188>
- Irawan, F. & Afif, R. A. (2020). Does Firms' Life Cycle Influence Tax Avoidance? Evidence from Indonesia. *International Journal of Innovation*, 14(1), 1212-1229.
- Kemenperin. (2019). *Tumbuh Positif, Industri Masih Kontributor Terbesar Ekonomi Hingga 19 Persen*. <https://kemenperin.go.id/artikel/20908/Tumbuh-Positif,-Industri-Masih-Kontributor-Terbbesar-Ekonomi-Hingga-19-Persen>
- Kurniasih, T. & Maria M. R. S. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66.
- Leip, T. A. (2017). Do institutional shareholders impact corporate tax avoidance?. *Accounting Annika Leipälä Spring 2017*.
- Mangonting, Y. & Onggara, C. T. (2019). The firm life cycle dynamics of tax avoidance. *Advances in Economics*, 69, 198-204. <https://dx.doi.org/10.2991/teams-18.2019.35>
- Meiza, R. (2015). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Padang*, 3, 1-26.
- Moshtagh, F., Abbaszadeh, M. R., Nowghabi, M. H. V. & Nowghabi, M. J. (2014). An Investigation of the Effect of Firm's Life Cycle Stages on Earning Quality: Evidence from Iran. *Asian Journal of Research in Banking and Finance*, 4(8), 109–122.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., Masitoh, E (2018). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance : Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322-340. <http://dx.doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Nugroho, W. C. & Agustia, D. (2017). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Firm Value. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 15-29. <http://dx.doi.org/10.47312/aar.v2i02.87>
- Oktadella, D. & Zulaikha. (2010). Analisis Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *E-journal Universitas Diponegoro*.
- Oktaviani, R. & Munandar, A. (2017). Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies. *Binus Business Review*, 8(3), 183-188. <https://dx.doi.org/10.21512/bbr.v8i3.3622>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 17*.
- Putra, P. D., Syah, D. H., Simatupang, B. H. (2018). Institutional Ownership and Tax Avoidance: A Review Agency Theory. *AISTSSSE*, 1-10.
- Raharjo, A. S. & Daljono. (2014). Pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan dan Indeks Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1-13.
- Ratih, P. S. & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1-13.
- Ratnawati, V., Azhari, S., Freddy, D., & Wahyuni, N. (2018). The Impact of Institutional Ownership and a Firm ' s Size on Firm Value : Tax Avoidance as a Moderating Variable. *Journal of Finance and Banking Review*, 3(1), 1–8. [http://dx.doi.org/10.35609/jfbr.2018.3.1\(1\)](http://dx.doi.org/10.35609/jfbr.2018.3.1(1))
- Rego, Olhoft S., dan Wilson R. (2012). Equity Risk Incentives and Firm Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3): 775-810.
- Rezayar, A., & Assadi, M. (2016). Investigating the Relationship between Agency Costs and Profit Forecast Error during the Life Cycle of Companies Listed In Tehran Stock Exchange. *Journal of Administrative Management, Education, and Training*, 12(2), 145–161. <http://dx.doi.org/10.5267/j.ac.2016.3.003>
- Rizal, I, A. & Sebrina, N. (2019). Pengaruh siklus hidup perusahaan dalam memoderasi hubungan manajemen laba dan cost of equity

- : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1( 3), 1013-1032.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.125>
- Sandy, S. & Lukviarman, N (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance : studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas*, 85-98.  
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Setiawan, A. & Hariyanti. (2018). Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Mediasi. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 7(1), 1-25.
- Suandy, E. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunarsih, & Oktaviani. (2016). Good corporate governance in manufacturing companies tax avoidance. *Jurnal Ekonomi*, 15(2), 85-96.  
<http://dx.doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Sunarsih, U. & Handayani, P. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163-185.
- Suranta, E., Midiastuty, P., Fitranita., Dianty, A. (2020). Siklus hidup perusahaan dan penghindaran pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi*, 16(1), 1 – 20.  
<http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6162>
- Tandean, V. A. (2015). Pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie*.
- Waluyo (2017). The effect of good corporate governance on tax avoidance : empirical of the Indonesian banking company. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 2(2), 1-9.  
<https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Yuni, N. P. A. I. & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 29(1), 128-144.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i01.p09>